

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Paguyuban Pasundan pada masa revolusi kemerdekaan merupakan suatu fase yang menjelaskan tentang perjuangan etnis dan golongan dalam memperjuangkan kemerdekaan, salah satunya etnis Sunda. Terjadi perubahan pemikiran dan pola perjuangan untuk meraih kemerdekaan, Paguyuban Pasundan berdiri dari pola dan perjuangan tersebut bentuk pemikiran baru dan pola perjuangan yang bersifat nasionalisme yang muncul pada saat organisasi perkumpulan etnis awal tahun 1900-an Paguyuban<sup>1</sup> ikut serta dalam perjuangan tersebut, banyak peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu sebelum kemerdekaan yang saling berkaitan di wilayah Indonesia<sup>2</sup>. Peristiwa kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan dan etnis yang mewakili<sup>3</sup>.

Selama beratus-ratus tahun lamanya bangsa Indonesia memperjuangkan arti kemerdekaan dan kebebasan berkebangsaan yang berdiri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain segera setelah proklamasi<sup>4</sup>, walaupun pada saat setelah pembacaan proklamasipun Jepang masih menguasai Indonesia akan tetapi Soekarno-Hatta mengutamakan pembentukan negara dengan pemerintahannya<sup>5</sup> sekalipun hubungan dengan *Gunseikanbu*<sup>6</sup> masih tetap terpelihara. Kebangkitan identitas yang lebih menyeluruh dan inisiatif orang Sunda sendiri ditempuh melalui

---

<sup>1</sup>Abu Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi* (Jakarta: Grafiti, 1982), hlm. 40.

<sup>2</sup>F.R. Ankersmith, *Refleksi tentang Sejarah pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 77.

<sup>3</sup>George Mc Kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia* (Ithaca. New York: Cornell University Press, 1961), hlm. 36.

<sup>4</sup>William H & Soeri Soeroto Frederick, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 78.

<sup>5</sup>Sartono Kartodirjo, *Elite dalam Prespektif Sejarah*. (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 66.

<sup>6</sup>A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia.*, 1 ed. (Bandung: Penerbit Angkasa., 1978), hlm. 216.

pembentukan perkumpulan atau organisasi<sup>7</sup>, dalam hal ini organisasi Paguyuban Pasundan. Hari lahir Paguyuban Pasundan pernah menjadi masalah di lingkungan organisasi tersebut masyarakat Sunda, dan kalangan sejarawan yang berdampak mengalami perubahan. Pada tiga buku peringatan lahirnya Paguyuban Pasundan yang terbit sebelum perang sebelum tahun 1942<sup>8</sup> tidak dikemukakan secara jelas mengenai hari lahirnya organisasi ini, yang diungkapkan hanya angka tahunnya saja, yakni 1915<sup>9</sup>.

Rupanya pada waktu itu hal tersebut dipandang tidak terlalu penting<sup>10</sup>, yang lebih penting adalah fungsi peringatannya bagi dinamika dan kemajuan organisasinya baru kemudian setelah Indonesia merdeka ketentuan lahirnya organisasi<sup>11</sup> pada hari yang tepat dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan bermakna<sup>12</sup>. Menurut Memed Erwan, pada mulanya hari lahir Paguyuban Pasundan itu diperingati pada tanggal 9 Desember yang diambil dari momen penanggalan surat keputusan *besluit* Gubernur Jendral Hindia Belanda yang mengakui dan mengesahkan organisasi ini sebagai badan hukum *besluit*<sup>13</sup> no. 46 tanggal 9 Desember 1914<sup>14</sup>. Pada masa R.S Suradiradja menjadi ketua umum Paguyuban Pasundan (1947-1968), pengakuan dan penetapan hari lahir Paguyuban Pasundan itu diubah menjadi tanggal 22 September 1914.

Tanggal, bulan, dan tahun tersebut, katanya, diambil dari momen pembentukan organisasi ini oleh beberapa orang mahasiswa *STOVIA* asal Sunda di lingkungan kampus sekolah mereka. Perubahan itu dipandang sangat penting dan perlu sesuai

---

<sup>7</sup>Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 155.

<sup>8</sup>Edi S. Ekajati, *Kebangkitan kembali orang Sunda: kasus Paguyuban Pasundan, 1913-1918*, Cet. 1 (Bandung: Pusat Studi Sunda bekerjasama dengan Kiblat, 2004), hlm.32.

<sup>9</sup>Memed Erawan, *Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancah Perjuangan Bangsa*, 1 ed. (Bandung: Mandalawangi, 1991), hlm. 44.

<sup>10</sup>Erawan H. Memed, *Paguyuban Pasundan, Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman (1914-2000)*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 200.

<sup>11</sup>Sulasman Setia Gumilar, *Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.102.

<sup>12</sup>Ekajati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm. 33.

<sup>13</sup>C.M. Pleijte, "Surat Keputusan Direktur Pengajaran dan Ibadat No. 5678/B, pemberian ijin kepada HIS Pasoedan di Cianjur terhitung tanggal 1 Nopember 1937" (Besluiten, 8 Maret 1938), ANRI.

<sup>14</sup>"*Gouverneur-generaal Indië Besluit Nee. 46*" (Besluiten, 9 Desember 1914), Onderwijs en Eredienst.

dengan perubahan nilai segala sesuatu yang berasal dari penguasaan kolonial dipandang bernilai positif dan perkembangan zamandari zaman kolonial menjadi zaman kemerdekaan.

Tampaknya perubahan waktu hari lahirnya tersebut ditetapkan sekitar tahun 1959, yaitu sesudah nama organisasi ini kembali lagi dipakai, setelah sejak tahun 1950 diubah menjadi Partai Kebangsaan Indonesia. Memang pada masa itu semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia sedang memuncak seiring dengan memuncaknya kepemimpinan Presiden Ir. Sukarno dan perjuangan membebaskan Irian Barat dari genggaman kolonialis Belanda. Dengan mengambil momen tersebut, maka jiwa dan warna nasional tercermin pada diri organisasi ini<sup>15</sup>, karena didirikan atas inisiatif orang Indonesia sunda sendiri, bukan datang dari keputusan penguasa kolonial. Sejak itu hari lahir Paguyuban Pasundan dipandang dan diperingati setiap tanggal 22 September, bahkan tulisan-tulisan sejarah pun baik berupa karya tulis populer maupun karya tulis ilmiah mencatat tanggal, bulan, dan tahun tersebut sebagai hari didirikannya Paguyuban Pasundan akan tetapi momen yang diambil bagi penanggalan tersebut ternyata dalam karya-karya tulis itu tidak sama, termasuk karya tulis yang disusun oleh kalangan pengurus besar organisasi ini pada tanggal 22 September 1914 itu merupakan penanggalan sepucuk surat yang dikeluarkan oleh pengurus organisasi ini.

Untuk mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum kepada pemerintahan Hindia Belanda. Tanggal 9 Desember 1914 adalah penanggalan keputusan *besluit* Gubernur Jendral Hindia Belanda yang mengakui dan mensahkan Paguyuban Pasundan sebagai badan hukum *Papaes Nonoman*<sup>16</sup>, 1, 31 Januari 1915 dan *Papaes Nonoman*<sup>17</sup>, 3, 31 Maart 1915<sup>18</sup>. Dengan lahirnya Paguyuban Pasundan

---

<sup>15</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, Ed. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 70.

<sup>16</sup>D.K Ardiwinata, “..”*Propaganda Pikeun Pagoejoeban*”.,” *Papaes Nonoman*, Nopember 1914, 10 edisi, bag. I.

<sup>17</sup>D.K Ardiwinata, “..”*Bedana Bareto djeung Ajeuna*”,” *Pasoendan*, Maart 1940, 3 edisi, bag. XXVI.

<sup>18</sup>Ekajati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm.34. Lihat antara lain : Ali Dkk. *Sedjarah Djawa Barat : Suatu Tanggapan*. Bandung, Pemerintahan Daerah Profinsi Jawa Barat, 1972. Saleh, *Sekitar lahir dan perkembangan Pagoejoeban Pasoendan*. Skripsi Sardjana. Bandung : Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1975. Ekadjati dkk. *Sejarah*

1913 yang didahului oleh kembalinya bahasa dan sastra Sunda sejak pertengahan abad ke-19<sup>19</sup>, seolah-olah menjadi tonggak sejarah kebangkitan kembali eksistensi<sup>20</sup> dan peranan orang Sunda di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya<sup>21</sup> sendiri dan masyarakat Indonesia yang multi-etnis dan multi-budaya. Sejak itu orang Sunda sadar akan keberadaan dan posisi mereka dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia<sup>22</sup>. Sebagaimana Budi Utomo, organisasi orang Jawa, pendirian Paguyuban Pasundan pun diprakarsai oleh siswa *STOVIA* yang bermukim di Jakarta. Tetapi dengan Budi Utomo<sup>23</sup> yang pembentukannya dilakukan hanya oleh para siswa *STOVIA* dalam suatu pertemuan 20 Mei 1908 di lingkungan sekolah mereka<sup>24</sup>, Paguyuban Pasundan dibentuk dalam satu pertemuan 20 Juli 1919<sup>25</sup> di rumah sesepuh orang Sunda yang bermukim di Jakarta D.K Ardiwinata yang dihadiri oleh beberapa kelompok siswa *STOVIA*, *HBS*, *KWS*<sup>26</sup> dan masyarakat Sunda yang bermukim di Jakarta dan Bogor baik pria maupun wanita<sup>27</sup>.

Pengurus dan anggota Paguyuban Pasundan yang merupakan perpaduan antara orang muda siswa dan orang madya karyawan serta dari kalangan menengah mewarnai sikap, pandangan, dan gerak organisasinya<sup>28</sup> yang bersifat moderat dan memilih cara evolusi dalam mengupayakan kemajuan yang didambakan oleh mereka. Baru setelah mayoritas kepengurusan dipegang oleh orang madya dan perkembangan pergerakan<sup>29</sup> nasional cenderung ke arah politik 1918, maka kalangan orang muda siswa melepaskan keikutsertaan dalam kepengurusan dan

---

*Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979. Suryawana, *Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasundan*. Bandung: Lembaga Kebudayaan Universitas Pasundan, 1990. Erawan. *Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancah perjuangan Bangsa*. Bandung.

<sup>19</sup>Nina H Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942)* (Bandung: Satya Historika, 1998), hlm. 157.

<sup>20</sup>Ekajati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm. 47.

<sup>21</sup>Burke Peter, *History and Social Theory*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 125.

<sup>22</sup>Ambo Upe, *Tradisi aliran dalam sosiologi: dari filosofi positivistik ke post positivistik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 145.

<sup>23</sup>Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi*, hlm. 120.

<sup>24</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 98.

<sup>25</sup>D.K Ardiwinata, "Petetan Paseodan," *Sipatahoenan*, 27 Maret 1937.

<sup>26</sup>Muhammad Enoch, "Pamidangan," *Sipatahoenan*, 27 Maret 1937.

<sup>27</sup>Ardiwinata, "..." "Propaganda Pikeun Pagoejoeban".

<sup>28</sup>Ekajati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm. 49.

<sup>29</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 120.

kegiatan Paguyuban Pasundan dan mereka mendirikan organisasi baru 1918<sup>30</sup> yang dinamai sekar Roekoen yang kelak 1928 mewakili pemuda Sunda dalam Kongres Pemuda Indonesia<sup>31</sup> yang melahirkan Sumpah Pemuda, sebuah pernyataan pertama dan bersama berbagai kelompok etnis di Indonesia yang mengakui berbangsa, bertanah air, dan berbahasa persatuan Indonesia.

Pada kedudukan Jepang<sup>32</sup> terlihat jelas maksud dan tujuan Jepang tidak ada niatan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia dan pada saat Jepang berkuasa semua organisasi dibekukan termasuk Paguyuban Pasundan. disisi lain Jepang hanya mengamankan posisi mereka yang sudah kalah perang Asia Raya, dan berniat untuk mengembalikan lagi daerah jajahan Jepang khususnya Indonesia ke tangan Sekutu yang dibelakangnya ada Kerajaan Protestan Belanda<sup>33</sup>, atas usaha para pemuda pada tanggal 22 Agustus 1945 berkumpul semua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan memutuskan langkah-langkah penyusunan negara<sup>34</sup> salah satu putusannya tentang daerah negara Indonesia yang sementara waktu terbagi menjadi 8 wilayah propinsi salah satunya Jawa Barat yang dipimpin oleh Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo tahun 1945 sampai periode gerakan nasional 1960 terus berkembang hingga dewasa sekarang<sup>35</sup>.

Tokoh Paguyuban Pasundan Otto Iskandardinata<sup>36</sup> mengikuti rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI diakhiri 18-22 Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menyampaikan empat macam usulan masalah yang terkait dengan hal-hal pemerintahan di Indonesia yang baru merdeka yang meliputi : rancangan pembagian wilayah negara pemerintahan daerah, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian urusan rakyat. Atas dasar usulan masalah tersebut, maka presiden seokarno menunjuk sembilan orang anggota sebagai panitia kecil dengan Otto Iskandardinata sebagai ketua, yang beranggotakan Mr. A.

---

<sup>30</sup>Ardiwinata, “..”Propaganda Pikeun Pagoejoeban”.”

<sup>31</sup>Kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia*, hlm. 76.

<sup>32</sup>Kahin, hlm. 69.

<sup>33</sup>Kahin, hlm. 60.

<sup>34</sup>Ben Anderson, *Revolusi Pemeoda ; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 70.

<sup>35</sup>“Memori Serah Terima Jabatan 1931-1940” (1980), Jawa Barat.

<sup>36</sup>Erawan, *Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancan Perjuangan Bangsa*, hlm. 50.



Subardjo, Sayuti Malik, Mr. Iwan Kusuma Sumantri, Wiranatakusuma, dr. Amir, A.A Hamidhan, dr. Ratulangie dan Mr. I. G. K Pujda, untuk merancang pembagian wilayah negara Pemerintahan Daerah, yang kemudian melahirkan Komite Nasional Daerah KND<sup>37</sup>.

Peran tokoh Paguyuban Pasundan Otto Iskandardinata dalam pembentukan KND Jawa Barat pada tanggal 9 September 1945 yang kemudian diresmikan tanggal 3 Oktober 1945 sebagai Badan Perwakilan Daerah didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1945 tentang pemerintahan Daerah pasal kedua terkait wewenang dan tugasnya yang berbunyi: "*Komite Nasional Daerah Mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, Jang sama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menajalakan pekerjadjaan mengatur rumahtangga daerahnja asal tidak beterntangan dengan Peraturan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah jang lebih dari padanja.*"<sup>38</sup> Untuk Provinsi Jawa Barat pada saat itu, KND diketuai untuk pertama kali oleh Otto Iskandardinata yang membawahi beberapa daerah<sup>39</sup>, daerah Jawa Barat menjadi daerah otonom provinsi dari Pemerintahan Replublik Indonesia menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1945<sup>40</sup>, Pada waktu itu yang terdiri atas 5 kota otonom, yaitu : Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon dan Sukabumi 5 keresidenan otonom, yaitu : Jakarta Raya, Priangan, Cirebon, Bogor, dan Banten 18 kabupaten otonom, Yaitu : Bandung, Garut, Sumedang Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Kuniangan, Indramayu, Purwarkarta, Tangerang, Jatinegara, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasbitung, dan Padeglang<sup>41</sup>.

Komite Nasional Daerah adalah penjelmaan kedaulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia<sup>42</sup> untuk menyelenggarakan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat yang mewakili seluruh etnis dan golongan yang ada di Indonesia. melalui

---

<sup>37</sup>Hikmat. Mahi M, *Lintas Sejarah Perjalanan DPRD Provinsi Jawa Barat 1945-2016.*, 1 ed. (Bandung: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2016), hlm. 22.

<sup>38</sup>Abu Hanifah, *Thales of a Revolution* (Sidney: Back, 1972), hlm. 55.

<sup>39</sup>Erawan, *Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancah Perjuangan Bangsa*, hlm. 54.

<sup>40</sup>A.H Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid I: Kenangan Masa Muda.*, 1 ed. (Jakarta: Gunung Api, 1977), hlm. 80.

<sup>41</sup>Kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia*, hlm. 47.

<sup>42</sup>Ankersmith, *Refleksi tentang Sejarah pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, hlm. 76.

keputusan itu pula masalah Komite Nasional Daerah, semacam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat daerah mulai dirintis keberadaannya, KND berfungsi membantu Gubernur dan *Residen* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Disamping itu tujuan dari dibentuknya KND secara umum adalah sebagai berikut Usaha-usaha Komite Nasional Daerah, yaitu pertama menyatakan kemauan rakyat kedua mempersatukan rakyat ketiga membantu menentramkan rakyat membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa komite<sup>43</sup> Nasional Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite nasional di daerah, bila perlu didirikan komite nasional di pusat daerah di tiap-tiap provinsi Komite Nasional di Pusat, di pusat daerah dan di daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota pengurus yang bertanggung jawab kepada komite Nasional<sup>44</sup>.

Komite Nasional Indonesia Pusat bertujuan untuk membentuk suatu wadah dan menghimpun dukungan masyarakat, penetapan ini kemudian dipertegas pada tanggal 25 Agustus 1945<sup>45</sup> Mr. Kasman Singodimendjo dan Otto Iskandardinata ketua dan anggota KNIP berdasarkan atas ketetapan PPKI tersebut di keresidenan Priangan, yang beribukotakan Bandung. Bersama dengan tugas dan wewenang KND Jawa Barat, struktur personalia yang diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1945 sebagai berikut : Ketua Otto Iskandardinata<sup>46</sup> Wakil Ketua I : Dr. Soeratman Erwin Wakil Ketua II : Mr. Samsudin Sekretaris : Hiswara Komisari : 1). Zulkarnaen Kartalegawa (Banten) 2). Moh. Rum (Jakarta) 3). Suriadiradja (Bogor) 4). Niti Sumantri (Priangan) 5). Nawawi Arif (Cirebon) menjelang akhir rapat pada 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan dibentuknya dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah KNID<sup>47</sup>, pembentukan KNID di Keresidenan Priangan ini dilaksanakan dua hari setelah terbentuknya KNIP yakni pada tanggal 24 Agustus 1945 bertempat di Gedung *Pensiunfons* kini Gedung Dwi Warma jalan Diponogora Bandung, rapat pembentukan KNID ini dipimpin R. Puradiredja, mantan wakil

---

<sup>43</sup>Frederick, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi.*, hlm. 67.

<sup>44</sup>Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia.*, hlm. 80.

<sup>45</sup>L De Jong, *Pendudukan Jepang di Indonesia Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda* (Jakarta: Kesaint Blanc, 1987), hlm. 53.

<sup>46</sup>Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia.*, hlm. 244.

<sup>47</sup>Anderson, *Revolusi Pemeoda ; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, hlm. 45.

Residen Priangan pada zaman Jepang<sup>48</sup>. Rapat tersebut berhasil memilih anggota sebanyak 23 orang termasuk didalamnya tiga orang wakil keturunan Arab, Indo, Cina dengan bidang garapan kesekretariatan KNID yaitu bidang bagian Umum, Bidang Bagian Penyelidikan dan Bidang Bagian Perencanaan sebagai bangsa yang baru merdeka tentunya Indonesia terus berbenah dalam aspek pemerintahan dan salah satunya adalah masalah rancangan kepengurusan di daerah, Peraturan UU No. 1 tahun 1945 tentang pembentukan kepengurusan atau lembaga di daerah yang telah dilaksanakan selama 3 tahun ternyata dianggap kurang memuaskan.

Salah-satu cara Belanda, hal ini disebabkan adanya isi undang-undang yang mencerminkan ketidaktegasan dalam pengaturan urusan pemerintahan daerah bahkan ada kesan tumpang-tindih antara tugas legislatif dengan tugas eksekutif, hal itu terlihat pada UU No. 1 Tahun 1945<sup>49</sup> pada pasal 3 yang berbunyi “Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai Badan *Exekutief*, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.” Kekurangjelasan peraturan ini disebabkan karena sejak tahun pertama diberlakukannya UU tersebut, masih terdapat banyak urusan pemerintah daerah yang melandaskan pada peraturan masa penjajahan Belanda dan Jepang<sup>50</sup>. Penyebab ini dipeparah lagi pada tahun kedua pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1945, yaitu pada saat Belanda kembali menduduki kota-kota penting di Jawa Barat untuk merebut hak-hak rakyat dengan cara membubarkan atau menghapus badan-badan pemerintahan daerah, membuat keputusan pemerintahan Belanda Nomor 10 Tahun 1948 tentang pembentukan Negara Pasundan di wilayah Jawa Barat<sup>51</sup>.

Di samping itu, ada pula beberapa peristiwa sejarah yang turut mempengaruhi stabilitas pemerintahan daerah Jawa Barat yaitu Bandung Lautan Api 23 Maret

---

<sup>48</sup>De Jong, *Pendudukan Jepang di Indonesia Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda*, hlm. 43.

<sup>49</sup>Anderson, *Revolusi Pemeoda ; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, hlm. 48.

<sup>50</sup>Anderson, hlm. 125.

<sup>51</sup>Frederick, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi.*, hlm. 76.



1946, Perjajian Linggarjati di Cirebon 15 November 1946, Perjajian Renville<sup>52</sup> 17 Agustus 1947, Pembantaian Rawagede 9 Desember 1947, Gerakan pasukan APRA 23 Januari 1950<sup>53</sup>, Peristiwa Hijrahnya Divisi Siliwangi Ke Yogyakarta peristiwa-peristiwa di atas tentu saja melumpuhkan roda pemerintahan di Indonesia, khususnya daerah Jawa Barat yang semestinya berjalan sebagaimana mestinya. Faktor lain yang mempengaruhi perundingan antara diplomatik secara formal antara Indonesia dan Belanda dimulai sejak tahun 1946 yaitu Konferensi *Hoge Veluwe* dengan perantaraan Inggris. Dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan hanya dicapai beberapa prinsip, yaitu pengakuan *de facto* atas Republik Indonesia Pulau Jawa saja. Ini tidak sesuai harapan bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya pada tanggal 7 Oktober 1946 delegasi Belanda dan delegasi Indonesia mulai berunding lagi dengan tekad mencapai suatu persetujuan.

Perundingan-perundingan itu diadakan dengan perantaraan Lord Killearn dari Inggris. Delegasi Belanda, yaitu *Commissie* General dipimpin Profesor W. Schermerhorn dan delegasi Republik dipimpin Sutan Syahrir yang berhasil membentuk kabinet lagi. Perundingan diadakan di Jakarta dan Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 antara kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Hasilnya terjadi perbedaan pemahaman tentang bentuk yang diinginkan kedua belah pihak<sup>54</sup>. Belanda menginginkan terbentuknya Negara Serikat sedangkan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 berbentuk Negara Kesatuan. Berdasarkan perjanjian Linggarjati Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara *de facto* atas Jawa dan Sumatra dan RI akan menjadi Negara Serikat Indonesia<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup>Ali Budiardjo, *"Linggarjati: Langkah Pertama Menuju Dekolonisasi Indonesia"* (Jakarta: Grafiti, 1992), hlm. 60.

<sup>53</sup>Zuhdi Susanto, *Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria Kartalegwa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat*, (Jakarta: Proyek IDSN Depdikbud, 1995), hlm. 66.

<sup>54</sup>Hanifah, *Thales of a Revolution*, hlm. 48.

<sup>55</sup>Susanto, *Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria Kartalegwa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat*, hlm. 50.

Akibat perbedaan pemahaman tentang isi Persetujuan Linggarjati pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda segera menyiapkan Agresi Militer untuk melemahkan kondisi Indoensia. Manuver Belanda melakukan pergerakan, maksud tujuan untuk menduduki Jawa Barat tidak termasuk Banten, perjanjian Linggarjati mengakibatkan Indonesia hanya berdaulat secara *de facto*. Belanda menggunakan kesempatan ini untuk menuntut supaya angkatan bersenjata Indonesia dibubarkan dan diganti oleh tentara Belanda. Tetapi ditolak sehingga situasi ini menjadi genting. Belanda kemudian menyerang RI dan berhasil menduduki Madura, sebagian Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat kecuali Banten, beberapa daerah di Palembang dan Sumatera Timur. Hasil dari perjanjian *Renville*<sup>56</sup> yang didukung oleh PBB dan Komisi Tiga Negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Dalam historiografi sejarah Pemerintahan Negara Pasundan 1947-1950 perlu dikemukakan *subject matter* yang akan diteliti mengapa perlu diteliti sejarahnya dan kita harus mereview penelitian sebelumnya tentang Negara Pasundan memberitahukan kekurangan para peneliti dahulu apakah masih bisa diteliti dan tidak menjadi plagiasi dalam penulisan. Penelitian terdahulu tentang Agus Mulyana. 1996. Tesis. Negara Pasundan 1947–1950 Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional. Jakarta : Program Studi ilmu Sejarah Bidang Ilmu Budaya Program Pascasarjana Universitas Indonesia<sup>57</sup>.

Berfokus pada konflik politik para menak sunda dan menjelaskan proses dan terjadinya berbagai perbedaan persepsi antara menak sunda dimulai dengan Suria Kartalegawa pada tahun 1947 membacakan teks proklamasi kemerdekaan dengan membentuk Partai Rakyat Pasundan, Suria Kartalegawa memproklamkan Negara Pasundan memiliki latar belakang primordialisme. Pada awal kemerdekaan, Jawa Barat ditetapkan menjadi provinsi di Jawa. Soekarno mengangkat Sutardjo sebagai gubernur Jawa Barat. Pengangkatan Sutardjo sebagai orang Jawa, dinilai oleh Kartalegawa dengan sikap sentimen. Kartalegawa<sup>58</sup> mempertanyakan apakah tidak

---

<sup>56</sup>Erawan, *Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancah Perjuangan Bangsa*, hlm. 63.

<sup>57</sup>Agus Mulyana, “*Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional*.” (ilmu Sejarah Bidang Ilmu Budaya, 1996).

<sup>58</sup>Susanto, *Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria Kartalegwa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat*, hlm. 65.

ada satupun orang Sunda yang pintar di Jawa Barat. Mengapa mesti orang Jawa, dengan demikian pendirian Negara Pasundan merupakan sikap pertentangan Kartalegawa terhadap pemerintah pusat atas pengangkatan Gubernur Jawa Barat bukan orang Sunda Sutardjo orang Jawa dan Datuk Jamin orang Sumatera.

Sebagai seorang keturunan menak Sunda, ia merasa memiliki hak tradisional untuk memimpin masyarakat Sunda di Jawa Barat. Jawa Barat pada waktu itu masih bagian Republik Indonesia dengan demikian diangkat seorang gubernur yang bukan orang Sunda, yaitu Mr. R. Sutardjo Kartohadikusumo, yang beberapa waktu kemudian diganti oleh Sewaka. Adapun Negara Pasundan Kedua dibentuk dalam Konferensi Jawa Barat. Menurut Edi S. Ekadjati<sup>59</sup>, bahwa harus dibedakan antara Negara Pasundan yang diproklamirkan Suria Kartalegawa dengan Negara Pasundan RIS hasil Konferensi Jawa Barat III. Meskipun tidak ada kaitan langsung antara keduanya, tetapi Suria Kartalegawa menganggap yang disebut terakhir yaitu Negara Pasundan<sup>60</sup> hasil Konferensi Jawa Barat merupakan penjelmaan kembali cita-citanya.

Adapun kebijakan-kebijakan politik yang dijalankan oleh TNI pada waktu itu yaitu menggabungkan cara-cara militer dengan sipil. Dimana militer menjadi subordinasi pihak sipil begitu juga sipil sepenuhnya tergantung pada militer. Di Jawa Barat dalam melikuidasi Negara Pasundan<sup>61</sup>, TNI melakukannya dengan langkah-langkah politik meliputi memperkuat terus-menerus pemerintahan militernya sedemikian sehingga wilayah Pasundan hanya kantor dan halamannya saja. mempengaruhi pegawai sipil Pasundan agar dapat berhenti dan menjadi pendukung Republik, membantu dan menyampaikan resolusi-resolusi dari masyarakat yang isinya menuntut dibubarkannya Negara Pasundan dan kembali ke RI, mengikat dan mempengaruhi para buruh, pelajar dan masyarakat agar secara spontan menyatakan sikap tegas menentang Negara Pasundan serta menuntut kembalinya RI.

---

<sup>59</sup>Ekadjati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm. 34.

<sup>60</sup>Agus Mulyana, *Negara Pasundan, 1947-1950: gejala menak Sunda menuju integrasi nasional* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 66.

<sup>61</sup>Mulyana, hlm. 77.

Setelah membandingkan beberapa sudut penelitian perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang dinamika sosial etnis Sunda khususnya dalam hal perkumpulan Etnis dan kondisi perkumpulan daerah setelah reformasi kemerdekaan bila melihat penelitian yang dilakukan oleh Agus Mulyana tentang gejolak menak sunda menuju integrasi nasional lebih terhadap konflik etnisitas suku dan golongan sunda sebagai kekuatan sejarahnya perlu adanya penyelesaian konflik dari hal tersebut interpretasi sejarah yang Agus Mulyana<sup>62</sup> menekankan proses ketidakpuasan suku sunda terhadap terpilihnya Mr. R. Sutardjo Kartohadikusumo yang bukan orang sunda. Melihat fakta sejarah tersebut Agus Mulyana menggali tentang konflik yang terjadi pada Negara Pasundan penelitian tersebut hanya secara administratif Negara Pasundan sebagai fokus permasalahan, belum dimunculkan suatu pembahasan dalam hal hubungan perkumpulan etnis dan solidaritas etnis dalam konflik tersebut.

### 1.2.Rumusan Masalah

Dalam penelitian sejarah batasan topik tergantung dengan asumsi pertanyaan sejarahwan<sup>63</sup> batasan-batasan penelitian melihat tahapan sejarahwan dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan kekuatan sejarah itu sendiri<sup>64</sup>, dijabarkan dalam pembahasan berikut :

- 1) Bagaimana latar historis Paguyuban Pasundan menjadi organisasi Masyarakat Sunda?
- 2) Bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan Paguyuban Pasundan dalam menghadapi kaum Sunda federalis dan republikan pada masa revolusi kemerdekaan ?

### 1.3.Tujuan Penelitian

---

<sup>62</sup>Mulyana, "*Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional.*"

<sup>63</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 51.

<sup>64</sup>Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, hlm. 60.

Tujuan penelitian dalam sejarah untuk mengetahui hasil dari analisa sejarawan dalam penulisan sejarah berdasarkan metodologi sejarah<sup>65</sup> yang bersifat empiris yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan latar historis Paguyuban Pasundan menjadi organisasi Masyarakat Sunda.
- 2) Menjelaskan penyelesaian konflik yang dilakukan Paguyuban Pasundan dalam menghadapi kaum Sunda federalis dan republiken pada masa revolusi kemerdekaan.

Penelitian tentang Paguyuban Pasundan ini memiliki tujuan individual yaitu untuk menyelesaikan studi magister sejarah pada program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Paguyuban Pasundan pada masa revolusi kemerdekaan diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis<sup>66</sup>. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan-temuan baru tentang sejarah pergerakan kemerdekaan termasuk membahas sejarah Paguyuban Pasundan pasca kemerdekaan. Secara praktis, hasil penelitian bermanfaat untuk mengetahui dinamika sosial<sup>67</sup> pasca kemerdekaan khususnya Paguyuban Pasundan dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan-temuan baru<sup>68</sup> tentang sejarah pergerakan dan organisasi bersifat kedaerahan termasuk membahas sejarah awal Paguyuban Pasundan. hasil penelitian bermanfaat untuk mengetahui perjuangan Paguyuban Pasundan dengan dalam perjuangan dan kondisi Paguyuban Pasundan 1947-1949.

---

<sup>65</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 1 ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2013), hlm. 67.

<sup>66</sup>Peter, *History and Social Theory*, hlm. 66.

<sup>67</sup>Peter, hlm. 214.

<sup>68</sup>Setia Gumilar, *Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, hlm. 70.



### 1.5.Landasan Teori

Untuk merancang suatu penelitian perlu adanya pemahaman teori khususnya dalam penelitian Paguyuban Pasundan pada masa revolusi kemerdekaan memerlukan pemahaman metodologi sejarah penggunaan teorinya Dengan pendekatan narativisme padangan lokal history dipertajam dengan analisa sosiologi dalam penelitian sejarah Rafl Dahrendorf konflik<sup>69</sup> dinamika sosial.kekuatan sejarah dari Kuntowijoyo menjelaskan sejarah Indonesia, institusi, terutama negara juga merupakan kekuatan yang menggerakkan sejarah. Era pergerakan nasional partai-partai politik didirikan untuk mempermudah penyebaran, pengorganisasian dan pencapaian cita-cita. Mula-mula didirikan PPPKI pada akhir 1927 oleh semua kekuatan politik yang ada, dan pada tahun 1939 dibentuklah Gabungan Politik Indoensia<sup>70</sup> oleh semua kekuatan politik kecuali PNI baru. Hasil politik yang terpenting ialah pernyataan persatuan pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang akan menulis sejarah politik, mungkin puas dengan melihat institusi politik.

Dapat dibayangkan kalau di permukaan ada peristiwa sehari-hari dibalik itu ada institusi berupa bahan-bahan, partai-partai dan pers, dibalik itu ada kekuatan-kekuatan sosial, dan di belakang itu ada lagi kekuatan sejarah yang lain baik pribadi atau ekonomi atau agama atau yang lain, sejarah itu bisa berlapis-lapis.<sup>71</sup> Dalam penelitian sejarah menggunakan metoda sejarah kualitatif datanya berupa deskripsikan berita, peninggalan, pikiran, perbuatan, dan perkataan dengan dipadukan dalam membaca sumber sejarah baik berupa surat keputusan, jumlah pegawai pemerintahan dengan begitu akan menghasilkan sejarah yang komperhensif dalam penulisannya.

Untuk mempertajam analisa sejarah menggunakan pendekatan Sosiologi pokok dari ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu politik ialah bahwa

---

<sup>69</sup>Ralph Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959), hlm. 67.

<sup>70</sup>Kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia*, hlm. 44.

<sup>71</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 87.

sejarah itu memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial meluas dalam ruang dengan menggunakan sejarah konstitusional kita dapat mengembangkan sejarah Paguyuban Pasundan mulai dari filsafat hidup, dasar pemikiran waktu membangun bangsa dan struktur yang dibangun dalam setiap konstitusi organisasi juga terlihat kepentingan konsesus yang dibuat dan konsesi yang diberikan kepada masing-masing kepentingan itu. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah institusional yang menganalisa perangkat lembaga, struktur, institusi, baik negara kabinet, birokrasi, parlementer, militer, meskipun kebanyakan buku dimasukan sebagai sejarah kajian politik setidaknya prespektif sejarah selalu tampak, dengan dibantu menggunakan pendekatan behavioral<sup>72</sup> dapat dianalisa dari segi perilaku negara dan partai-partai politik dalam sosialisasi gagasan, rekrutmen pimpinan dan anggota, pelaksanaan tindakan politik termasuk dalam sejarah perilaku.<sup>73</sup>

#### 1.6. Kajian Pustaka

Untuk mengkaji Paguyuban Pasundan pada masa revolusi secara mendalam dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka sebagai sumber sekunder, sumber sekunder diperlukan dalam hal penelitian untuk mendukung bahasan penelitian<sup>74</sup> dan menjelaskan penelitian yang akan diteliti selain kelengkapan sumber sekunder yang pada umumnya penelitian tentang organisasi Paguyuban Pasundan telah banyak diteliti oleh para civitas, khususnya sejarawan baik dari dalam keangggotan Paguyuban Pasundan sendiri maupun dari kelompok luar belum mengetahui terhadap organisasi Paguyuban Pasundan itu sendiri karena penelitian ini membahas tentang maka diperlukan pula penelitian yang lain yang relevan mengenai penelitian terdapat penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan maupun ilmuan lainnya :

---

<sup>72</sup>Kartodirjo, *Elite dalam Prespektif Sejarah.*, hlm. 55.

<sup>73</sup>Peter, *History and Social Theory*, hlm. 84.

<sup>74</sup>Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, hlm. 70.

- 1) *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* karya A.K Pringgodigdo<sup>75</sup> dalam bukunya menguraikan Pagoejoeban Pasoendan secara luas buku yang ditulis pada masa kedudukan Jepang ini terbit pertama kali tahun 1949, membuat banyak fakta sejarah pergerakan masa yang ditulis meliputi periode 1908-1942<sup>76</sup> yang dibaginya dalam tiga babakan waktu yaitu 1908-1920, 1920-1930<sup>77</sup>, dan 1930-1942 organisasi yang dikelompokkan, diuraikan secara singkat sejak lahir sampai tahun 1942 Pagoejoeban Pasoendan yang masuk dalam kelompok “perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan kedaerahan” diuraikan dalam tiga tempat. Uraiana yang dibuat mengikuti babakan waktu diatas, agak membantu pembaca memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkumpulan ini.
- 2) *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*<sup>78</sup> karya J. Th Petrus Blumberger menghasilkan sebuah karya yang didasarkan atas sumber primer Belanda karyanya menguraikan sejarah pergerakan nasional Indonesia sejak 1908 sampai tahun 1930, terbit di Haarlem tahun 1931.
- 3) *Om de Vrijheid. De Nationalistische Beweging in Inonesie 1913-1930*<sup>79</sup> buku karangan D.M.G Koch menjelaskan tentang pergerakan nasional yang menguraikan Pagoejeoban Paseondan dan beberapa perkumpulan lainnya yang sejenis atau organisasi-organisasi kedaerahan dan mejelaskan sejarah singkat awal berdirinya Pagoejoeban Paseondan sampai 1930.
- 4) *Kebangkitan Kembali Orang Sunda Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*<sup>80</sup> Karya Edi S. Ekadjati menganalisis perubahan yang terjadi dalam orang Sunda, salah satu etnis di Indonesia. Setelah mengalami masa

---

<sup>75</sup>A.K Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1960), hlm. 38.

<sup>76</sup>“Gouverneur-generaal Indië Besluit Nee. 46.”

<sup>77</sup>C.M. Pleijte, “Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 72 pengakuan/Pengesahan terhadap Pagoejoeban Pasoendan sebagai organisasi politik.” (Besluiten, 13 Juni 1919), ANRI.

<sup>78</sup>J. Th Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch-Indie* (Haarlem: H.D Tjeek Willink & Zoon NV, 1931), hlm. 57.

<sup>79</sup>D.M.G Koch, *Om de Vrijheid De Nationalistische Beweging in Inonesie* (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1950), hlm. 11.

<sup>80</sup>Ekadjati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm. 15.

keprihatinan yang cukup panjang sejak runtuhnya Kerajaan Sunda (1579), pada pertengahan abad ke-19 mereka bangkit untuk membentuk dan menampilkan kembali identitas kebudayaan serta memperbaiki kejetahteraan hidup mereka. Kebangkitan mula-mula dalam lapangan bahasa dan sastra (1850), kemudian (1913) meningkat ke dalam lapangan sosial budaya, dan akhirnya (1918) dalam politik kenegaraan dan kebangkitan kembali tahap kedua yang diawali oleh berdirinya sebuah organisasi modern untuk ukuran waktu itu bernama Paguyuban Pasundan. Berkat kesadaran dan kepeloporan para siswa sekolah dokter bumiputera (*Stovia*) asal etnis Sunda Paguyuban Pasundan berupaya untuk mengerakan dan mempersatukan orang Sunda, terutama kalangan kaum mudanya, dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan pergaulan antara etnis di Indonesia. Dengan menempuh berbagai cara dan jalan yang sama sekali baru waktu itu, seperti kegiatan berorganisasi, pendidikan, penertiban, ilmu pengetahuan, mereka berusaha untuk bersama-sama mencapai kemajuan sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman.

- 5) *Perjoagan Paguyuban Pasundan 1914-1942*<sup>81</sup> karya Sjarif Amin menjelaskan tentang sejarah organisasi Paguyuban Pasundan dari awal berdirinya sampai dengan masa kedudukan Jepang. Perjuangan Paguyuban Pasundan sangatlah dramatis dalam memperjuangkan pergerakan kebangsaan Indonesia abad ke-20. Yang berjuang melawan kolonialisme oleh bangsa lain, dan Paguyuban Pasundan dapat mendirikan sekolah, kantor ekonomi rakyat, jeung kantor nasehat hukum (*advies bureau*) dan ketua Paguyuban Pasundan pada masa Otto Iskandardinata, nalika merjoangkeun cita-cita kemerdekaan Indonesia dina sidang dewan rakyat (*Volksraad*).

---

<sup>81</sup>Sjarif Amin, Paguyuban Pasundan (Bandung), dan Pengurus Besar, *Perjoangan Paguyuban Pasundan, 1914-1942*, 2013, hlm. 38.

6) *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942 Profil Pegerakan Etno-Nasionalis*<sup>82</sup>

Karya Suharto menjadi salah satu referensi penelitian tentang studi tentang paguyuban pasundan buku ini menjelaskan tentang pendirian paguyuban pasundan di Jakarta oleh para pelajar *STOVIA* berlanjut dengan perkembangannya periode 1927-1931 perodesasi penting dalam perkembangan dan menjelaskan kiprah dan eksistensi paguyuban pasundan di segala bidang untuk memperjuangkan masyarakat sunda dari kemiskinan dan kebodohan mulai dari 1931 sejak perkumpulan dipimpin oleh Oto Iskandardinata, terjadi kemajuan pesat tahun 1931<sup>83</sup> merupakan tahun awal periode ketiga terakhir dari sejarah Pagoejoeban Pasoendan. Sejak itu, perhatiannya makin dipusatkan berbagai masalah lebih tajam, dan secara terbuka menyatakan simpatinya terhadap perkumpulan-perkumpulan yang radikal dibidang politik, Pagoejoeban Pasoedan selalu ikut ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa nasional.

### 1.7. Metode Penelitian

Sejarah sebagai studi ilmu pastilah memiliki metodologi<sup>84</sup> dalam tahapan perkembangan ilmunya oleh karenanya memiliki sifat yang empiris dan memiliki objek kajian pada hakikatnya peradaban manusia itu sendiri dan dalam penelitian memiliki langkah-langkah penelitian,<sup>85</sup> baik secara umum kita kenal, pemilihan topik, heuristik, kritik intern dan ektern, analisis dan interpretasi. Penelitian tentang Paguyuban Pasundan pada masa revolusi kemerdekaan menggunakan<sup>86</sup> penelitian sejarah karena objeknya berkaitan tentang masa lalu yang besumberkan fakta-fakta

---

<sup>82</sup>Suharto, *Pagoejoeban Pasoendan, 1927-1942: profil pergerakan etno-nasionalis*, Cet. 1 (Bandung: Lembaga Kajian Strategis Paguyuban Pasundan : Satya Historika, 2002), hlm. 27.

<sup>83</sup>“Surat dari penasehat Urusan Bumiputra Pengamatannya terhadap perkumpulan Pasoedan,” geheim eigenhandig (Wetevreden: De Adviseur voor Inlandse (en Arabische), 10 April 1929), Het Departement van Onderwijs, Eredienst.

<sup>84</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 45.

<sup>85</sup>Kuntowijoyo, hlm. 45.

<sup>86</sup>Kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia*, hlm. 40.



sejarah baik itu arsip dan dokumen pelaku sejarah.<sup>87</sup> Terdapat langkah yang baku dan prosedur yang harus dilewati dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan sejarah.

Beberapa langkah dan prosedur dalam penelitian sejarah disebut dalam metodologi penelitian sejarah atau disebut juga metode historis sejarahrawan<sup>88</sup> pada awalnya merupakan kajian keilmuan yang masih belum dikatakan ilmiah karena sumber data yang digunakan pada masa itu masih bersumber dari filsafat spekulatif dan kisah-kisah sastra masa lalu, pada 1876 terbitlah sebuah jurnal *Revue Historique* yang bertujuan untuk mengubah sejarah menjadi sebuah sains positif yang memiliki tahapan yang pertama heuristik adalah kegiatan dalam pengumpulan sumber untuk mendapatkan data-data sejarah atau evidensi Sejarah. Secara khusus, sumber tertulis dalam arsip yang berhubungan dengan sejarah Indonesia atau Nusantara diantaranya adalah arsip berupa *staatsblad*, *besluit*, *register*, *regering almanac*, *report* dan *harheim* (surat rahasia)<sup>89</sup>.

Tahapan Pengumpulan sumber (**heuristik**) Sejarahrawan pada awalnya merupakan kajian keilmuan yang masih belum dikatakan ilmiah karena sumber data yang digunakan pada masa itu masih bersumber dari filsafat spekulatif dan kisah-kisah sastra masa lalu, pada 1876 terbitlah sebuah jurnal *Revue Historique* yang bertujuan untuk mengubah sejarah menjadi sebuah sains positif yang memiliki tahapan yang pertama heuristik adalah kegiatan dalam pengumpulan sumber untuk mendapatkan data-data sejarah atau evidensi *Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-(Oost) Indië* (Laporan umum tentang pendidikan di Hindia(-Timur)-Belanda), 1915-1938 (*Batavia: Verwachting*) Laporan ini memuat informasi yang rinci tentang pendidikan umum (sekolah rendah / dasar; sekolah lanjutan, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi, baik pribumi maupun berbahasa Belanda) dan pendidikan kejuruan.

*Handelingen en bijlagen van de Volksraad* (Notula dan lampiran dari Dewan Rakyat) Di dalamnya dimuat antara lain teks-teks pidato dari direktur OE (N).

---

<sup>87</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 55.

<sup>88</sup>Kuntowijoyo, hlm. 77.

<sup>89</sup>Ambo Upe, *Tradisi aliran dalam sosiologi*, hlm. 50.

*Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië* (Pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Masyarakat di Hindia-Belanda), 1925-1939 (*Batavia: Dienst der Volksgezondheid*) Catatan: Dinas ini juga menerbitkan publikasi antara lain tentang Quarantaine- en epidemievoorchriften in Nederlandsch-Indië (1939). *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (Lembaran Negara Hindia-Belanda) Untuk berkas ini digunakan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1866 no. 127; 1869 no. 105; 1885 no. 7; 1904 no. 380; 1907 no. 406; 1911 no. 467; 1914 no. 194; 1919 no. 2; 1921 no. 327; 1924 no. 576.<sup>90</sup> Sejarah banyak hal yang dilakukan dalam tahapan ini untuk menjawab asumsi pertanyaan yang peneliti ajukan perlunya sumber baik itu sumber primer<sup>91</sup>, sumber sekunder yang pertama mengumpulkan sumber primer berupa fakta-fakta Paguyuban Pasundan pada masa revolusi kemerdekaan.

Sumber tertulis dan wawancara dengan tokoh atau partisipan perkumpulan yang masih hidup, sumber-sumber primer sebagian besar diperoleh dari Arsip Nasional di Jakarta dan asing yang dapat dikelompokkan menjadi pertama Arsip-arsip atau dokumen-dokumen berupa *besluiten* (surat-surat keputusan) pemerintahan, surat-surat pribadi/resmi, dan *mailrapporten* kedua publikasi resmi berupa *Regeerings Almanak*, *Javasche Courant*, *Handelingen van den Volksraad*, *Indisch Verslag*, dan *Overzicht van de Inlandsche en Malaisch-Chineesche Pres* ketiga sumber-sumber primer Indonesia berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan, surat kabar, Majalah atau orgaan perkumpulan, buku kenang-kenangan Pagoehoeban Paseodan dan dituliskan para tokoh Pagoejoeban Pasoedan yang dimuat, baik dalam surat kabar kebangsaan maupun majalah sezaman dan terbitan lainnya.

Sumber-sumber primer lokal berupa surat kabar merupakan bahan dokumen<sup>92</sup> yang sangat berharga. Surat kabar bukan saja memberikan banyak informasi

<sup>90</sup>“Surat dari Penasehat Bumiputra No.1532 verslag rapat Pasoendan di Sukabumi pada tanggal 22 September 1929 disampaikan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda,” openbaar archief (Weltevreden: De Adviseur voor Inlandse (en Arabische), 28 September 1929), Het Departement van Onderwijs, Eredienst.

<sup>91</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 76.

<sup>92</sup>Oman Fathurahman, *Filologi Indonesia: teori dan metode*, 2015, hlm. 44.

perlengkap, melainkan juga digunakan untuk mencetak data, fakta, serta pendapat yang terdapat dalam catatan-catatan resmi<sup>93</sup>. Suatu keuntungan dari surat kabar adalah bahwa informasi tentang fakta itu sangat pendek jarak waktunya dari peristiwanya sehingga pada umumnya tepat walaupun demikian, penggunaan fakta dalam surat sering kurang teliti, hal itu disebabkan antara lain karena singkatnya waktu pada wartawan untuk mengeloh informasi yang mereka peroleh. Selain itu, pada surat kabar sering ada kecenderungan untuk menarik perhatian dan memuat berita yang sensasional, dengan akibat terjadi pemutarbalikan fakta, sesuai dengan asas dan tujuan surat kabar itu. Sumber primer Indonesia adalah buku-buku kenangan organisasi yang diterbitkan tiga kali selama masa kolonial. Buku-buku kenangan itu pertama kali terbit tahun 1931, berjudul *Herdenking Pagoejoeban Pasoendan*, kedua tahun 1935 dengan judul *Pangemoet-Pangemoet kana Ngadegna Pagoejoeban Paseondan Doea Poeloeh Taoen, 1915-1935*, dan terakhir tahun 1939 dengan judul *Genkboek Pasoendan 25 Tahoen*. Buku-buku kenangan itu merupakan sumber yang penting, didalamnya terdapat informasi yang luas tentang organisasi.<sup>94</sup>

Dalam sumber primer lokal berupa artikel-artikel yang dibuat oleh para tokoh Pagoejoeban Pasoendan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perkumpulan yang dimuat dalam surat kabar atau majalahnya. Dari artikel-artikel itu diperoleh data penting yang tidak dapat diperoleh dari sumber tertulis lainnya, misalnya artikel dari D.K Ardiwinata<sup>95</sup> dan Dr. Djeondjoenan Setiakoesoemah<sup>96</sup> yang didalamnya antara lain melukiskan sejarah berdirinya Pagoejoeban Pasoendan. Data dalam tulisan itu dapat dipercaya karena selain materi yang ditulis adalah pengalaman sendiri, juga waktu penulisannya belum terlalu lama dari peristiwanya. Sebuah sumber dari yang sangat membantu dalam studi ini adalah buku yang diterbitkan pertama kali pada zaman Jepang oleh *Gunseikanbu*<sup>97</sup> berjudul orang

---

<sup>93</sup>Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, hlm. 66.

<sup>94</sup>Sulasman, hlm. 67.

<sup>95</sup>D.K Ardiwinata, "Bedana Bareto djeung ajeuna," *Sipatahoenan*, Maret 1940.

<sup>96</sup>Adil Poeradiredja, "Jasana Obor Pasoendan," *Sipatahoenan*, 27 Maret 1937.

<sup>97</sup>Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 67.

Indonesia jang Terkemuka di Djawa. Dari buku ini diperoleh informasi mengenai riwayat hidup singkat para tokoh Pagoejeoban Pasoendan<sup>98</sup>.

Tahapan selanjutnya adalah **(kritik sumber)** Pada tahapan ini sumber dikumpulkan pada kegiatan heuristik yang berupa buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang terkait ataupun hasil temuan dilapangan tentang bukti-bukti pembahasan atau utama penelitian selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada yakni sumber yang faktual dan originalistasnya terjamin ini yang dikenal dengan kritik dokumen-dokumen berupa berupa *mailrapporten* yang disimpan dalam arsip-arsip bekas kementrian Urusan Jajahan, merupakan sumber yang sangat bernilai bagi penulisan Sejarah. Otentitas dokumen-dokumen itu perlu dilakukan kritik ekstern dan kritik intern terhadapanya. *Mailrapporten* yang menyangkut Paguyuban Pasundan cukup banyak, yaitu bertahun 1929,1932, 1934, 1935,1939, dan 1940.

*Mailrapporten* itu memberikan data tentang pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapat terbuka, kongres-kongres dan aksi Paguyuban Pasundan anatar tahun 1913-1960<sup>99</sup> data yang didalamnya dapat dipercaya karena pembuatan laporan adalah petugas atau pejabat yang hadir dalam rapat-rapat dan kongres-kongres itu dan laporan dibuat beberapa hari setelah kegiatan itu dilangsungkan. Dokumen-dokumen berupa surat resmi dan surat keputusan yang disimpan di Arsip Nasional RI di Jakarta, merupakan sumber-sumber yang bernilai tinggi bagi penulisan sejarah. Dokumen-dokumen lainnya berupa surat resmi yang dibuat oleh Pasoedan Istri *Afdeeling* Tasikmalaya

*Hoofdbestuur Pagoejeoban Paseondan, Directeur van Onderwijs en Eeredienst*<sup>100</sup> yang ditunjukan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda. Surat Keputusan yang disebutkan pertama memberikan Informasi tentang sekolah-

---

<sup>98</sup>Ekajati, *Kebangkitan kembali orang Sunda*, hlm. 44.

<sup>99</sup>“Kongres Pasoendan tanggal 8 dan 9 April 1939 di Cianjur disampaikan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda di Butenzorg.” geheim (Batavia: De Adviseur voor Inlandse (en Arabische), 3 Mei 1939), Het Departement van Onderwijs, Eredienst.

<sup>100</sup>“Gouverneur-generaal Indië Besluit Nee. 46”; “Statuten Pagoejeoban Paseondan disahkan Pemerintah Hindia Belanda dengan surat keputusan Gubernur Jenderal No. 46,” t.t.; “tanggal 9 Desember 1914, kemudian diubah dengan surat keputusan Gubernur Jenderal No. 72, tanggal 13 Juni 191,” t.t.

sekolah yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan berupa *Hollandsch-Inlandsche school* (HIS) di Cilimus (daerah Cirebon) dan di Cianjur, serta surat keputusan yang disebutkan belakangan dan lampiran-lampirannya memberikan data mengenai peraturan dasar organisasi publikasi-publikasi resmi berupa *Regeering-Almanak*, (1927-1941), *Javasce Courant*<sup>101</sup> (1915 dan 1919), *Hendelingen van den Volksrand*<sup>102</sup> (1927-1942), *Indisch Versleg*<sup>103</sup> (1930-1941), dan *Overzicht van de Inlandsche en Malaisch Chineesche Pres* (1927-1941) merupakan sumber-sumber pelengkap yang penting khusus terhadap sumber yang disebutkan terakhir dari sumber ini dapat dilakukan pencarian terhadap sumber-sumbernya yaitu surat kabar pribumi.

Tahapan selanjutnya adalah (**Interpretasi**) dalam sejarah, fakta-fakta<sup>104</sup> yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat diulang serta diimplikasikan sesuai keinginan. Fakta-fakta sejarah telah dikumpulkan sesuai dengan sudut pandang yang ada yang disebut dengan sumber-sumber sejarah.<sup>105</sup> Sumber-sumber sejarah hanya mencatat fakta-fakta yang tampilannya cukup menarik untuk dicatat sehingga sumber-sumber sejarah hanya berisi fakta yang sesuai dengan teori yang ada. interpretasi sejarah subjektivitas sejarahwan diakui keabsahannya karena sejarahwan melakukan metode ilmiah dengan hanya mengungkapkan fakta berupa sumber yang sah dan kritik sumber, periodisasi penting dalam interpretasi periode merupakan batasan yang penting karena pembahasan yang dikaji akan terukur secara metodologis dengan ada periodisasi waktu akan tahapan-tahapan interpretasi seiring dengan waktu dan kejadian analisis interpretasi.

Selanjutnya tahapan (**Histrografi**) Sejarah mempunyai dua arti yang dapat membedakan sejarah dengan penulisan sejarah, sejarah dalam artian objektif<sup>106</sup> adalah kejadian sejarah yang sebenarnya, terjadi hanya sekali dan bersifat unik

<sup>101</sup>“Javasche Courant” (Weltevreden, dan 1919 1915), Het Departement van Onderwijs, Eredienst.

<sup>102</sup>“Handelingen Volksraad” (zittingsjaar, 1932 1931), Het Departement van Onderwijs, Eredienst.

<sup>103</sup>“Indisch Verslag,” 1931, Het Departement van Onderwijs, Eredienst.

<sup>104</sup>Setia Gumilar, *Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, hlm. 77.

<sup>105</sup>Setia Gumilar, hlm. 77.

<sup>106</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi sejarah*, hlm. 66.



adapun sejarah dalam artian subjektif adalah gambaran atau cerita secara tulisan serta tulisan tentang kejadian atau histrogarfi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.

